

**PENDIDIKAN BERBASIS KOMUNITAS DENGAN
PENDEKATAN NILAI BUDAYA DAN POTENSI LOKAL
(Strategi Alternatif Pemberdayaan Masyarakat
Penambang Intan Di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru)**

MUHAMMAD RAHMATTULLAH

ABSTRACT

This article aims to explain the concept of community-based education as an alternative model of empowerment that can be developed on diamond mining community in Cempaka District, Banjarbaru, South Kalimantan. The concept of community-based education that will be presented is expected to provide an overview of the conceptual strategy of empowerment refers to the condition of the diamond miners community. This article based on field research with qualitative approach. Data were collected through literature study, observation, and interviews with diamond miners in Pumpung Village, Cempaka District, Banjarbaru. Data analysed with qualitative method. Conclusions of this article: to change the paradigm of diamond mining community to gradually abandon their respective work toward a more productive work requires a unique empowerment strategy. Community-based education model with an approach that combines local cultural values and local potential offered as an alternative strategy of empowerment that can be applied to the diamond mining community.

Keywords: *Empowerment, Community Based Education, Social Capital, Diamond Miners*

LATAR BELAKANG

Ekonomi kelembagaan sebagai salah satu paradigma baru dalam ilmu ekonomi memandang kelembagaan sebagai faktor yang memiliki peran penting dalam penciptaan perekonomian yang lebih efisien di masyarakat. Veblen dalam Pujiati (2011) mengungkapkan salah satu pandangannya bahwa perkembangan ekonomi selalu dikondisikan baik secara langsung atau tidak langsung oleh keadaan sosial dan kelembagaan yang melingkupinya. Teori kelembagaan yang dikemukakan oleh Samuels dalam Prasad (2003) mengungkapkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam struktur dan perilaku sosial yang melembaga pada

kelompok tertentu merupakan aspek yang perlu menjadi perhatian di samping faktor harga.

Saptana, dkk (2003) mengungkapkan dalam kehidupan masyarakat pedesaan, terdapat tiga lembaga yang menjadi pilar penopangnya, yaitu kelembagaan komunitas lokal (*communal institutions*), kelembagaan pasar (*private sector*), dan kelembagaan sistem politik atau sistem pengambilan keputusan di tingkat publik (*public sector*). Ketiga bentuk kelembagaan ini merupakan satu kesatuan yang sinergi dan menjadi fondasi dalam membangun kekuatan ekonomi di tingkat pedesaan. Dalam perspektif *Local Economic Development* (LED)

Alamat Korespondensia:

Muhammad Rahmattullah, Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP,

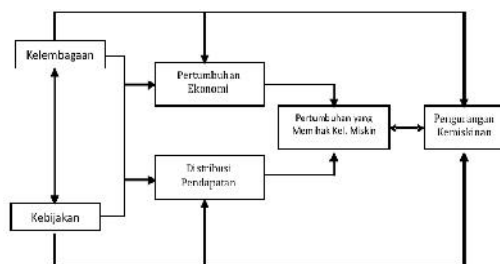
Universitas Lambung Mangkurat

Email: nu_city88@yahoo.com

yang dikemukakan oleh ILO (2006), pemberdayaan komunitas lokal menjadi faktor penting dalam pembangunan masyarakat di tingkat lokal itu sendiri.

Kelembagaan komunitas lokal pada dasarnya dapat memberikan efek positif dan negatif dalam pembangunan kehidupan Dasgupta (2003) mengemukakan jaringan informal yang terbentuk pada skala komunitas lokal memiliki peran penting sekaligus bisa menjadi ancaman pada berbagai aspek kehidupan masyarakat di tingkat lokal. Humaedi (2011) menunjukkan bahwa lembaga tradisi sebagai bentuk komunitas lokal di satu sisi mampu menjaga eksistensi kehidupan masyarakat tetapi pada sisi lain dapat menjadi faktor pendorong terjadinya kemiskinan.

Deolalikar (2002) dalam Yustika (2010) mengemukakan hubungan kelembagaan dan kebijakan dalam upaya pengurangan kemiskinan dalam bagan berikut:



Sumber: Deolalikar (2002) dalam Yustika (2010)

Bagan 1. Hubungan antara Kelembagaan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengurangan Kemiskinan

Dari bagan tersebut terlihat bahwa ketika kelembagaan ekonomi yang disandingkan dengan berbagai kebijakan yang dibuat oleh

pemerintah dapat terorganisir dengan baik, akan terjadi pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang lebih adil bagi masyarakat. Efek lanjutan dari pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang lebih adil tersebut akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang juga memihak kepada keluarga miskin sehingga masalah kemiskinan yang terjadi di masyarakat dapat dikurangi secara berangsur-angsur.

Pengkajian tentang bentuk dan pola kelembagaan pada komunitas lokal akan berperan dalam upaya penguatan dan pengembangan perannya untuk peningkatan kehidupan masyarakat lokal. Tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi komunitas lokal dalam kegiatan ekonomi selalu memiliki sisi positif dan negatif terhadap kehidupan. Pengenalan dari berbagai sisi akan memberikan gambaran riil yang dapat menjadi bahan masukan dalam pengambilan kebijakan ke arah penguatan peran komunitas lokal tersebut dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

Salah satu bentuk eksistensi komunitas lokal dalam kegiatan lokal yang sampai sekarang masih bertahan adalah penambangan intan rakyat di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Penambangan intan rakyat tersebut telah berlangsung sejak lama dan hingga sekarang masih bertahan. Dalam berbagai aspek kegiatan penambangan ini ternyata lebih banyak memberikan dampak negatif dalam berbagai aspek. Hasil kajian As'ad (2005) menunjukkan bahwa kegiatan penambangan memberikan dampak negatif terhadap keberlanjutan lingkungan hidup di sekitar wilayah penambangan baik dari aspek fisik,

kimia, maupun biologi. Menurut penuturan Lurah Sungai Tiung Kecamatan Cempaka yang dipaparkan oleh Azkia (2012) keberadaan tambang intan rakyat ini tidak mampu menyejahterakan para pendulang yang berasal dari masyarakat setempat bahkan hanya mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan secara terus menerus.

Dalam konteks kemiskinan, keberadaan penambangan intan rakyat di Daerah Cempaka ternyata tidak mampu mengangkat derajat ekonomi masyarakat setempat. Data BPMPKB Kota Banjarbaru Tahun 2011 sebagaimana tertuang dalam Buku Putih Sanitasi Kota Banjarbaru (2012) memaparkan secara statistik sebaran penduduk miskin di Kecamatan Cempaka berada pada peringkat kedua dari lima kecamatan yang ada yakni sebanyak 993 Kepala Keluarga atau sebesar 21,40% dari total Keluarga miskin di Kota Banjarbaru. Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Miskin Perkecamatan Di Kota Banjarbaru Tahun 2011

No.	Kecamatan	Jumlah		
		RT	RW	Penduduk (KK)
1	Lardasan Ulin	147	29	1,3
2	Liang Anggang	71	15	5
3	Cempaka	103	30	5
4	Banjarbaru Utara	125	27	6
5	Banjarbaru Selatan	128	23	7
TOTAL KESELURUHAN		574	124	4,6

Sumber :

Buku Putih Sanitasi Kota Banjarbaru (2012)

Temuan Azkia (2012) menyatakan bahwa masyarakat setempat yang memilih menjadi pendulang intan pada dasarnya didasari oleh motif kesejahteraan yakni pemenu-

han kebutuhan hidup dan peningkatan taraf perekonomian ke arah yang lebih baik. Para pendulang merupakan aktor yang berperan aktif untuk memilih pekerjaan ini dibandingkan pekerjaan lain yang menurut mereka tidak mampu memberikan “kejutan” berlipat gandanya penghasilan ketika mereka memperoleh intan yang besar dan bernilai tinggi. Meskipun demikian, ada aspek yang belum tersentuh dari temuan tersebut yakni faktor-faktor lain di luar motif ekonomi pribadi. Mengingat keberadaan pendulang sebagai pekerjaan yang melibatkan banyak orang, perlu ditelusuri peran komunitas setempat yang membuat mereka tetap bertahan untuk bekerja sebagai penambang. Eksistensi komunitas lokal penambang intan di Kecamatan Cempaka merupakan komunitas yang telah melembaga secara turun temurun dan masih terus bertahan hingga sekarang. Tentunya ada nilai-nilai yang melekat dalam komunitas tersebut hingga tetap bertahan di tengah pro kontra keberadaan mereka di wilayah tersebut.

Hal menarik yang perlu ditelusuri adalah perlunya upaya untuk mentransformasi paradigma dan perilaku masyarakat penambang dalam konteks pemanfaatan lingkungan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan hidup. Temuan As'ad (2005) mengindikasikan minimnya pengetahuan masyarakat penambang intan tentang pengetahuan lingkungan hidup dan ketidak mampuan mereka untuk memanfaatkan lingkungan sekitar walaupun mereka memiliki persepsi yang baik untuk memelihara lingkungan. Dalam konteks ini, upaya untuk memberdayakan mereka melalui pembentukan pola pikir, kemandirian, dan

keaktivitas untuk mengolah alam sekitar selain menjadi penambang perlu dikaji lebih lanjut agar dapat dirumuskan pula secara sistematis kebijakan yang dapat diaplikasikan terkait pemberdayaan masyarakat penambang tersebut. Salah satu strategi pemberdayaan alternatif yang dapat dikembangkan sebagai solusi adalah implementasi program pendidikan berbasis komunitas.

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan konsep pendidikan berbasis komunitas sebagai alternatif model pemberdayaan yang dapat dikembangkan pada komunitas penambang intan di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Konsep pendidikan berbasis komunitas yang akan dipaparkan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai strategi konseptual pemberdayaan mengacu pada kondisi komunitas masyarakat khususnya penambang intan di Kecamatan Cempaka.

METODE

Artikel ini disusun berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan telaah dokumen. Data dikumpulkan melalui studi literatur, observasi, dan wawancara langsung dengan sejumlah penambang intan di Desa Pumpung, Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Pendidikan Berbasis Komunitas, Sebuah Alternatif Model Pemberdayaan

Merubah paradigma masyarakat tentunya bukanlah perkara yang ringan. Dalam konteks masyarakat sebagai sebuah komunitas yang memiliki kekhasan tersendiri, dalam hal ini komunitas penambang intan; salah satu pendekatan pemberdayaan yang dapat dikembangkan yakni pendidikan berbasis komunitas. Pendidikan berbasis komunitas (*community-based education*) merupakan mekanisme yang memberikan peluang bagi setiap orang untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran seumur hidup. Kemunculan paradigma pendidikan berbasis komunitas dipicu oleh arus besar modernisasi yang menghendaki terciptanya demokratisasi dalam segala dimensi kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan. Mau tak mau pendidikan harus dikelola secara desentralisasi dengan memberikan tempat seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat. (Sudjana, 2000) Sebagai implikasinya, pendidikan menjadi usaha kolaboratif yang melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Partisipasi pada konteks ini berupa kerja sama antara warga dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, menjaga dan mengembangkan aktivitas pendidikan. Sebagai sebuah kerja sama, maka masyarakat diasumsi mempunyai aspirasi yang harus diakomodasi dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu program pendidikan. (Effendi, 2008)

Pendidikan berbasis komunitas merupakan perwujudan demokratisasi pendidikan melalui perluasan pelayanan pendidikan untuk kepentingan masyarakat. Pendidikan berbasis komunitas menjadi sebuah gerakan penyadaran masyarakat untuk terus belajar sepanjang hayat da-

lam mengisi tantangan kehidupan yang berubah-ubah. Secara konseptual, pendidikan berbasis komunitas adalah model penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip “dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat”. Pendidikan “dari masyarakat” artinya pendidik memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Pendidikan “oleh masyarakat” artinya masyarakat ditempatkan sebagai subyek/pelaku pendidikan, bukan objek pendidikan. Pada konteks ini, masyarakat dituntut peran dan partisipasi aktifnya dalam setiap program pendidikan, terutama pada saat pelaksanaannya. Adapun pengertian pendidikan “untuk masyarakat” artinya masyarakat diikutsertakan dalam semua program yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mereka. Secara singkat dikatakan, masyarakat perlu diberdayakan, diberi peluang dan kebebasan untuk mendesain, merencanakan, membiayai, mengelola dan menilai sendiri apa yang diperlukan secara spesifik di dalam, untuk dan oleh masyarakat sendiri. (Si-hombing, 1999).

Di dalam Undang-undang No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 16, arti dari pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dengan demikian nampak bahwa pendidikan berbasis komunitas pada dasarnya merupakan suatu pendidikan yang memberikan kemandirian dan kebebasan pada masyarakat untuk menentukan bidang pendidikan yang sesuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri.

Sementara itu di lingkungan akademik para ahli juga memberikan batasan pendidikan berbasis komunitas. Galbraith (1992) dalam Sudjana (2000) menjelaskan bahwa: “*community-based education could be defined as an educational process by which individuals (in this case adults) become more competent in their skills, attitudes, and concepts in an effort to live in and gain more control over local aspects of their communities through democratic participation.*” (pendidikan berbasis komunitas dapat diartikan sebagai proses pendidikan di mana individu-individu atau orang dewasa menjadi lebih berkompeten dalam ketrampilan, sikap, dan konsep mereka dalam upaya untuk hidup dan mengontrol aspek-aspek lokal dari masyarakatnya melalui partisipasi demokratis)

Pendapat lebih luas tentang pendidikan berbasis komunitas dikemukakan oleh Smith (2008) adalah sebagai berikut: “*community-based education defined as a process designed to enrich the lives of individuals and groups by engaging with people living within a geographical area, or sharing a common interest, to develop voluntarily a range of learning, action, and reflection opportunities, determined by their personal, social, economic and political need.*” (pendidikan berbasis komunitas adalah sebuah proses yang didesain untuk memperkaya kehidupan individual dan kelompok dengan mengikutsertakan orang-orang dalam wilayah geografi, atau berbagi mengenai kepentingan umum, untuk mengembangkan dengan sukarela tempat pembelajaran, tindakan, dan kesempatan refleksi yang ditentukan oleh pribadi,

sosial, ekonomi, dan kebutuhan politik mereka)

Dengan demikian, pendekatan pendidikan berbasis komunitas adalah salah satu pendekatan yang menganggap masyarakat sebagai agen sekaligus tujuan, melihat pendidikan sebagai proses dan menganggap masyarakat sebagai fasilitator yang dapat menyebabkan perubahan menjadi lebih baik. Dari sini dapat ditarik pemahaman bahwa pendidikan dianggap berbasis komunitas jika tanggung jawab perencanaan hingga pelaksanaan berada di tangan masyarakat. Pendidikan berbasis komunitas bekerja atas asumsi bahwa setiap masyarakat secara fitrah telah dibekali potensi untuk mengatasi masalahnya sendiri. Baik masyarakat kota ataupun desa, mereka telah memiliki potensi untuk mengatasi masalah mereka sendiri berdasarkan sumber daya yang mereka miliki serta dengan memobilisasi aksi bersama untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi.

Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003 di dalam pasal 55 tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat/Komunitas disebutkan sebagai berikut :

- a. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis komunitas pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- b. Penyelenggara pendidikan berbasis komunitas mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- c. Dana penyelenggaraan pendid-

ikan berbasis komunitas dapat bersumber-dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Lembaga pendidikan berbasis komunitas dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- e. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dari kutipan tersebut nampak bahwa pendidikan berbasis komunitas dapat diselenggarakan dalam jalur formal maupun nonformal, serta dasar dari pendidikan berbasis masyarakat adalah kebutuhan dan kondisi masyarakat, serta masyarakat diberi kewenangan yang luas untuk mengelolanya. Karena itu dalam proses penyelenggaraannya perlu memperhatikan tujuan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat.

Dalam hubungan ini, pendidikan nonformal berbasis komunitas adalah pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan dan berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pengetahuan dan keterampilan fungsional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan ke-

cakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis. (Sihombing, 1999)

Menurut Galbraith (1992) dalam Sudjana (2000), pendidikan berbasis komunitas memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. *Self determination* (menentukan sendiri). Semua anggota masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk terlibat dalam menentukan kebutuhan masyarakat dan mengidentifikasi sumber-sumber masyarakat yang bisa digunakan untuk merumuskan kebutuhan tersebut.
- b. *Self help* (menolong diri sendiri). Anggota masyarakat dilayani dengan baik ketika kemampuan mereka untuk menolong diri mereka sendiri telah didorong dan dikembangkan. Mereka menjadi bagian dari solusi dan membangun kemandirian lebih baik bukan tergantung karena mereka beranggapan bahwa tanggung jawab adalah untuk kesejahteraan mereka sendiri.
- c. *Leadership development* (pengembangan kepemimpinan). Para pemimpin lokal harus dilatih dalam berbagai ketrampilan untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, dan proses kelompok sebagai cara untuk menolong diri mereka sendiri secara terus-menerus dan sebagai upaya mengembangkan masyarakat.
- d. *Localization* (lokalisasi). Potensi terbesar untuk tingkat partisipasi masyarakat tinggi terjadi ketika masyarakat diberi kesempatan dalam pelayanan, program dan kesempatan terlibat dekat dengan kehidupan tempat masyarakat hidup.
- e. *Integrated delivery of service* (keterpaduan pemberian pelayanan). Terdapat hubungan antaragensi di antara masyarakat dan agen-agen yang menjalankan pelayanan publik dalam memenuhi tujuan dan pelayanan publik yang lebih baik.
- f. *Reduce duplication of service*. Pelayanan Masyarakat seharusnya memanfaatkan secara penuh sumber-sumber fisik, keuangan dan sumber daya manusia dalam lokalitas mereka dan mengkoordinir usaha mereka tanpa duplikasi pelayanan.
- g. *Accept diversity* (menerima perbedaan). Menghindari pemisahan masyarakat berdasarkan usia, pendapatan, kelas sosial, jenis kelamin, ras, etnis, agama atau keadaan yang menghalangi pengembangan masyarakat secara menyeluruh. Ini berarti pelibatan warga masyarakat perlu dilakukan seluas mungkin dan mereka didorong/dituntut untuk aktif dalam pengembangan, perencanaan dan pelaksanaan program pelayanan dan aktifitas-aktifitas kemasyarakatan.
- h. *Institutional responsiveness* (tanggung jawab kelembagaan). Pelayanan terhadap kebutuhan

masyarakat yang berubah secara terus-menerus adalah sebuah kewajiban dari lembaga publik sejak mereka terbentuk untuk melayani masyarakat. Lembaga harus dapat dengan cepat merespon berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat agar manfaat lembaga akan terus dapat dirasakan.

- i. *Lifelong learning* (pembelajaran seumur hidup) Kesempatan pembelajaran formal dan informal harus tersedia bagi anggota masyarakat untuk semua umur dalam berbagai jenis latar belakang masyarakat (Sudjana, 2000).

Dengan berbagai karakteristiknya, konsep pendidikan berbasis komunitas sebenarnya merupakan perwujudan dari upaya penguatan modal sosial yang berkembang dalam suatu kelompok masyarakat. Konsep modal sosial sendiri oleh Bourdieu (1986) dalam Adhikari, (2009), didefinisikan sebagai kumpulan sumberdaya yang dibutuhkan oleh individual atau kelompok sehingga dapat memiliki jaringan hubungan institusional yang lebih tahan lama agar saling mengakui dan menghargai. Definisi berpengaruh lainnya tentang modal sosial menghubungkan modal sosial dalam menciptakan hasil pendidikan dan modal manusia (Coleman 1990 dalam Adhikari, 2009).

Menurut Putnam (1995) dalam Adhikari (2009), bahwa modal sosial mengacu kepada ciri organisasi sosial, seperti jaringan, norma dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kinerja agar saling menguntungkan. Dia melihat modal

sosial sebagai bentuk barang publik berbeda dengan pengaruhnya terhadap kinerja ekonomi dan politik pada level kolektif. Dia menekankan bahwa partisipasi orang-orang dalam kehidupan asosiasional menghasilkan institusi publik lebih efektif dan layanan lebih baik. Putnam, et al (dalam Suharto, 2007) menyatakan modal sosial adalah penampilan organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma-norma (atau hal timbal balik), dan jaringan (dari ikatan-ikatan masyarakat), yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi adanya koordinasi dan kerjasama bagi keuntungan bersama. Narayan (dalam Suharto, 2007) menyatakan modal sosial adalah aturan-aturan, norma-norma, kewajiban-kewajiban, hal timbal balik dan kepercayaan yang mengikat dalam hubungan sosial, struktur sosial dan pengaturan-pengaturan kelembagaan masyarakat yang memungkinkan para anggota untuk mencapai hasil sasaran individu dan masyarakat mereka.

Blakeley dan Suggate, dalam Suharto (2007) menyatakan bahwa unsur-unsur modal sosial adalah: (1) Kepercayaan, tumbuhnya sikap saling percaya antar individu dan antar institusi dalam masyarakat; (2) Kohesivitas, adanya hubungan yang erat dan padu dalam membangun solidaritas masyarakat; (3) Altruisme, paham yang mendahulukan kepentingan orang lain; (4) Perasaan tidak egois dan tidak individualistik yang mengutamakan kepentingan umum dan orang lain di atas kepentingan sendiri; (5) Gotong-royong, sikap empati dan perilaku yang mau menolong orang lain dan bahu-membahu dalam melakukan berbagai upaya untuk kepentingan bersama; dan (6) Jaringan, dan kolaborasi sosial,

membangun hubungan dan kerjasama antar individu dan antar institusi baik di dalam komunitas sendiri/ kelompok maupun di luar komunitas/kelompok dalam berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Implementasi pendidikan berbasis komunitas pada dasarnya akan membantu dalam memperkuat berbagai unsur pokok dari modal sosial itu sendiri. Hasbullah (2006) mengetengahkan enam unsur pokok yang membangun modal sosial yaitu: 1) *Participation in a network*. Kemampuan sekelompok orang untuk melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial, melalui berbagai variasi hubungan yang saling berdampingan dan dilakukan atas dasar prinsip kesukarelaan (*voluntary*), kesamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*), dan keadaban (*civility*). Kemampuan anggota kelompok atau anggota masyarakat untuk selalu menyatukan diri dalam suatu pola hubungan yang sinergis akan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kuat tidaknya modal sosial suatu kelompok. 2) *Reciprocity*. Kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Pola pertukaran terjadi dalam suatu kombinasi jangka panjang dan jangka pendek dengan nuansa altruism tanpa mengharap imbalan. Pada masyarakat dan kelompok-kelompok sosial yang terbentuk yang memiliki bobot resiprositas kuat akan melahirkan suatu masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial yang tinggi. 3) *Trust*. Suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu

seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung. Tindakan kolektif yang didasari saling percaya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk dan dimensi terutama dalam konteks kemajuan bersama. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk bersatu dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial. 4) *Social norms*. Sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat dalam suatu entitas sosial tertentu. Aturan-aturan ini biasanya ter-institusionalisasi, tidak tertulis tapi dipahami sebagai penentu pola tingkah laku yang baik dalam konteks hubungan sosial sehingga ada sangsi sosial yang diberikan jika melanggar. Norma sosial akan menentukan kuatnya hubungan antar individu karena merangsang kohesifitas sosial yang berdampak positif bagi perkembangan masyarakat. Oleh karenanya norma sosial disebut sebagai salah satu modal sosial. 5) *Values*. Sesuatu ide yang telah turun temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat. Nilai merupakan hal yang penting dalam kebudayaan, biasanya ia tumbuh dan berkembang dalam mendominasi kehidupan kelompok masyarakat tertentu serta mempengaruhi aturan-aturan bertindak dan berperilaku masyarakat yang pada akhirnya membentuk pola cultural. dan 6) *Proactive action*. Keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk tidak saja berpartisipasi tetapi senantiasa mencari jalan bagi keterlibatan anggota kelompok dalam suatu kegiatan masyarakat. Anggota kelompok melibatkan diri dan mencari kesempatan yang dapat memperkaya hubungan-hubungan sosial dan

menguntungkan kelompok. Perilaku inisiatif dalam mencari informasi berbagai pengalaman, memperkaya ide, pengetahuan, dan beragam bentuk inisiatif lainnya baik oleh individu maupun kelompok, merupakan wujud modal sosial yang berguna dalam membangun masyarakat.

Pendidikan Berbasis Masyarakat dengan Pendekatan Nilai Budaya dan Potensi Lokal untuk Komunitas Penambang Intan di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru

Hasil observasi dan wawancara dengan sejumlah penambang menunjukkan bahwa pada dasarnya mereka tidak sepenuhnya ingin bekerja sebagai penambang. Faktor keterbatasan modal, pendidikan dan keterampilan menjadi beberapa alasan yang dikemukakan sebagai penyebab bertahannya mereka sebagai penambang intan. Pengharapan untuk hidup yang lebih layak melalui pekerjaan alternatif di luar penambang mengemuka ketika proses wawancara dilakukan. Aktivitas sosial yang mereka lakukan di luar bekerja sebagai penambang biasanya terjadi pada hari Jum'at saat kegiatan penambangan diliburkan. Pada hari tersebut, para penambang akan banyak berada di lingkungan rumahnya dan berinteraksi lebih intens dengan tetangga di lingkungan tempat mereka tinggal.

Wilayah Kecamatan Cempaka sendiri masih memiliki potensi alam yang dapat diolah seperti untuk kegiatan bertani dan berkebun. Potensi ini masih belum tergarap secara optimal mengingat pola pikir penambang yang menganggap penghasilan dari kegiatan menambang jauh lebih besar walaupun tidak

setiap saat. Di sisi lain, struktur masyarakat Cempaka yang masih lekat dengan nilai-nilai religiusitas Islam sebenarnya merupakan potensi yang perlu diperhatikan sebagai modal untuk memberdayakan masyarakat setempat khususnya para penambang.

Mengacu pada situasi ini, salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan terkait langkah pendidikan berbasis masyarakat adalah melalui pendekatan nilai budaya dan potensi lokal. Dalam konsep pendidikan berbasis potensi lokal, menurut Suratno, dkk (2013), ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yakni:

- a. Pendekatan kemanusiaan, yaitu bahwa warga belajar sebagai subyek dalam pembelajaran, sehingga warga belajar mempunyai kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Warga belajar tidak lagi dipandang sebagai individu yang kosong, tidak tahu dan tidak terampil apa-apa, tetapi warga belajar merupakan sosok individu yang memiliki kemampuan untuk dikembangkan lebih lanjut
- b. Kemitraan dalam mengembangkan berbagai potensi yang ada di desa/daerah perlu dilaksanakan antara berbagai pihak yang terkait. Dengan adanya kemitraan, maka akan terjalin kerjasama yang harmonis untuk saling mendukung dalam hal pemanfaatan potensi yang ada untuk dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembelajaran
- c. Pendekatan edukatif dan partisipasi dalam menggali potensi yang ada di daerah dapat meningkatkan peran serta setiap pihak untuk mengembangkannya, sehingga potensi tersebut dapat

- dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembelajaran.
- d. Berkelanjutan, melalui pendekatan ini diharapkan semua potensi yang dimiliki terus tergali, sehingga pemanfaatannya dapat digunakan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan.
 - e. Pendekatan sosial, budaya dan agama merupakan salah satu cara dalam menggali potensi yang ada di masyarakat. Budaya masyarakat banyak sekali jenisnya, tergantung dari daerah masing-masing, sehingga dengan keragaman budaya tersebut dapat merupakan salah satu potensi yang dapat digunakan dan dikembangkan untuk kegiatan pembelajaran.
- a) program belajar disusun berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal yang didasarkan pada analisis profit, efisiensi dan kualitas;
 - b) proses pembelajaran lebih bersifat student centered, dengan indikator: (1) pembelajaran menitikberatkan pada keaktifan siswa, (2) kegiatan belajar dilakukan secara kritis dan analitis, (3) tutor berperan sebagai fasilitator;
 - c) Strategi yang digunakan, menitikberatkan pada keaktifan warga belajar, dengan menggunakan pembelajaran partisipatif;
 - d) Potensi lokal yang dimanfaatkan dalam pembelajaran adalah: lingkungan alam, sosial, budaya, teknologi, pasar, lembaga keuangan, kemitraan;
 - e) Tutor dipilih dari masyarakat setempat, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya, diakui keberadaannya oleh masyarakat

Dalam proses pembelajaran, warga belajar menjadi subyek pembelajaran, sehingga dalam pembelajaran lebih berorientasi pada *learner centered*. Pembelajaran yang berpusat pada warga belajar memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga belajar untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran, sehingga tutor berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi warga belajar dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang berorientasi kepada student centered akan menumbuhkan kreativitas warga belajar, karena warga belajar diberi kesempatan untuk mengembangkan gagasan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Strategi yang tepat digunakan untuk melibatkan warga belajar adalah pembelajaran partisipatif. Suratno, dkk (2013) menguraikan pelaksanaan pembelajaran berbasis potensi lokal dilaksanakan dengan berdasarkan pada indikator sebagai berikut:

Terkait pendekatan nilai budaya, figur tokoh-tokoh agama yang ada di wilayah Kecamatan Cempaka memiliki kedudukan yang penting. Masyarakat setempat masih memiliki kecenderungan untuk patuh terhadap tokoh agama yang sering disebut sebagai *Tuan Guru* sebagai panutannya. Kedudukan dan perannya sangat kuat dalam masyarakat, karena *Tuan Guru* dipandang masyarakat sebagai orang yang memiliki keunggulan ilmu dan pengetahuan, sehingga dapat menampilkan pribadi yang penuh ketauladanan, mempunyai otoritas yang tidak tergoyahkan dan kharismatik. Dukungan dari *Tuan Guru* ini tentunya dapat menjadi pendamping atau bahkan tokoh sentral dalam keberhasilan program pendidikan berbasis komunitas yang memadukan

nilai budaya dan potensi lokal khususnya di masyarakat penambang intan Kecamatan Cempaka.

baik oleh para dosen maupun mahasiswa dari berbagai fakultas dan jurusan yang relevan.

PENUTUP

Kesimpulan

Merubah paradigma komunitas penambang intan untuk secara perlahan meninggalkan pekerjaan yang mereka geluti ke arah pekerjaan yang lebih produktif memerlukan strategi pemberdayaan yang khas. Model pendidikan berbasis komunitas dengan pendekatan yang memadukan nilai budaya dan potensi lokal ditawarkan sebagai strategi alternatif pemberdayaan yang dapat diaplikasikan pada masyarakat penambang intan di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru.

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang diajukan dalam artikel ini antara lain:

1. Perlu dilakukan penyusunan perencanaan terkait rancangan startegi pendidikan berbasis nilai budaya dan potensi lokal. Perencanaan harus melibatkan pengelola, tutor dan warga belajar. Komponen yang direncanakan menyangkut identifikasi kebutuhan belajar dan potensi, perumusan tujuan, penentuan bahan/materi pembelajaran, sumber dana, metode, dan penentuan waktu yang tepat. Keterlibatan pihak pemerintah setempat dan tokoh-tokoh agama perlu diperkuat agar perencanaan yang dibuat lebih komprehensif dan aplikatif.
2. Keterlibatan pihak perguruan tinggi perlu pula diintenskan terutama melalui program-program pengabdian masyarakat

DAFTAR RUJUKAN

- Adhikari, Krishna Prasad. 2009. *Social Capital and its "Downside"; The Impact on Sustainability of Induced Community-Based Organization Nepal*. World Development Volume 38 No (2): pp.184-194.
- Anonim, 2012. *Buku Putih Sanitasi Kota Banjarbaru 2011*. Pemerintah Kota Banjarbaru.
- As'ad. 2005. *Pengelolaan Lingkungan pada Penambangan Rakyat (Studi Kasus Penambangan Intan Rakyat di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan)*. Tesis. Program Magister Ilmu Lingkungan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Azkie, Laila. 2012. *Pemanfaatan Momen Produktif dalam Tambang Rakyat Sebuah Aplikasi Soft Systems Methodology (SSM)*. Tesis. Program Pascasarjana Departemen Sosiologi FISIP UI. Depok.
- Effendi, M. (2008). *Pendidikan Berbasis Komunitas: Alternatif di Dunia Pendidikan*. Diakses dari: <http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/11/07/01015730/pendidikan>.
- Hasbullah, Jousairi. 2006. *Sosial Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*. Jakarta: MR United Press.
- Humaedi, M. Alie. 2011. *Mematahkan Pewarisan Kemiskinan*. Jurnal Masyarakat dan Budaya. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pusat

- Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Jakarta.
- International Labour Organisation [ILO]. 2006. *Working Out of Poverty in Ghana: The Ghana Decent Work Pilot Program*. ILO – Ghana Decent Work Pilot Program Office; Accra, Ghana.
- Prasad, B.C. 2003. *Institutional Economics And Economic Development: The theory of Property Rights, Economic Development, Good Governance and Environment*". International Journal of Social Economics Vol 30 No. 6 pp.741-762
- Pujiati, Amin. 2011. *Menuju Pemikiran Ekonomi Ideal: Tinjauan Filosofis dan Empiris*. Fokus Ekonomi (FE), Agustus 2011, Hal 114-124
- Saptana, dkk. 2003. *Transformasi Kelembagaan Tradisional Untuk Menunjang Ekonomi Kerakyatan Di Pedesaan: Studi Kasus Di Propinsi Bali Dan Bengkulu*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, DEPTAN, Bogor. 2003
- Sihombing, Umberto. (1999). *Pendidikan Luar Sekolah, Kini dan Masa Depan: Konsep, Kiat, dan Pelaksanaan*. Jakarta: PD. Mahkota
- Smith, K. (2008). *Community based education*. Diakses dari Bremen Overseas Research and Development (BORDA), Web site: <http://www.bordasa.org/modules/cjaycontent/index.php?id=29>
- Sudjana, H.D. (2000). *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Luar Sekolah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Falah Production.
- Suharto, Edy. 2007. *Modal Sosial dan Kebijakan Publik*. pdf (secured). Diunduh pada 16 Oktober 2014
- Suratno, dkk. 2013. *Identifikasi Potensi dan Ekspektasi Pendidikan Berbasis Community Learning dalam Rangka Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan*. Laporan Penelitian. Banjarmasin. Universitas Lambung Mangkurat
- Yuastika, Ahmad Erani. 2010. *Kebijakan Reformasi dan Kerapuhan Kelembagaan Ekonomi: Ikhtiar Meluruskan Arah Perekonomian Nasional*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Ekonomi Kelembagaan Pada Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Universitas Brawijaya Malang, 30 Desember 2010.